

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Pringsewu

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Lampung yang dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung tanggal 26 November 2008. Secara geografis, Kabupaten Pringsewu dengan ibu kota Pringsewu terletak diantara $104^{\circ}45'25''$ – $105^{\circ}8'42''$ Bujur Timur (BT) dan $5^{\circ}8'10''$ – $5^{\circ}34'27''$ Lintang Selatan (LS), dan terletak sekitar 35 km dari Bandar Lampung ibu kota Provinsi Lampung.

Secara administratif, wilayah ini berbatasan langsung dengan tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tanggamus. Hasil kajian yang tertera dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten

Pringsewu tahun 2010-2013 menunjukkan, bahwa Kabupaten Pringsewu terdiri dari delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Adiluwih, Banyumas, Gading Rejo, Pagelaran, Pardasuka, Pringsewu dan Kecamatan Sukoharjo, dengan wilayah seluas 625,1 km² atau 62.510 hektar. Jika ditinjau dari aspek kondisi fisik wilayah, sebagian besar atau 64,88% wilayah Kabupaten Pringsewu berada pada ketinggian 100-200 meter dpl (dari permukaan laut) yang sebagian besar tersebar di Kecamatan Pagelaran. Kelas ketinggian lahan tertinggi mencapai > 400 meter dpl yang sebagian besar tersebar di wilayah Kecamatan Pardasuka dan Pagelaran.

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pringsewu berdasarkan kemiringan lahan cukup bervariasi. Meski demikian, secara umum kondisi lahan di daerah ini termasuk kategori cukup datar, kecuali sebagian kecil di bagian selatan Kecamatan Pardasuka, dan di daerah Barat Daya Kecamatan Pagelaran yang termasuk wilayah berbukit terjal.

Jika ditinjau dari aspek klimatologi, Kabupaten Pringsewu merupakan daerah tropis, dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 161,8 mm/ bulan, dan rata-rata jumlah hari hujan mencapai 13,1 hari/ bulan, dengan rata-rata temperature suhu berkisar antara 22,9⁰ C – 32⁰C. Rata-rata kelembaban relatif antara 56,8% - 93,1% dengan tekanan udara berkisar antara 1008,1 nbs – 936,2 nbs. Berdasarkan karakteristik klimatologi tersebut, Kabupaten Pringsewu merupakan daerah potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian.

Kondisi Kabupaten Pringsewu ditinjau dari aspek hidrologi menunjukkan bahwa seluruh wilayah di daerah ini terletak dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sub DAS. Secara rinci tentang aliran sungai yang melintas di kawasan ini sebagai berikut.

1. Way Sekampung bagian tengah, sepanjang 24 km dengan daerah aliran sepanjang 600 kilometer persegi.
2. Way Gading, sepanjang tujuh kilometer dengan daerah aliran sepanjang 56 kilometer persegi.
3. Way Apus, sepanjang enam koma delapan kilometer dengan daerah aliran sepanjang 5.440 kilometer persegi.
4. Way Wonokoro, sepanjang delapan koma delapan kilometer dengan daerah aliran sepanjang 7.040 kilometer persegi.
5. Way Wayah, sepanjang 19 kilometer dengan daerah aliran sepanjang 380 kilometer persegi.
6. Way Sangsep, sepanjang 17 kilometer dengan daerah aliran sepanjang 225 kilometer persegi.
7. Way Marga Harjo, sepanjang dua koma lima kilometer dengan daerah aliran sepanjang 15 kilometer persegi.

Selain itu potensi hidrologi lain yang berada di Kabupaten Pringsewu adalah Cekung Air Tanah (CAT) yaitu suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis

seperti proses penimbunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah yang dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah Cekungan Air Tanah (CAT) dimaksud meliputi :

1. Cekungan Air Tanah Metro – Kotabumi yang berada di wilayah Kecamatan Adiluwih, Sukoharjo, Gadingrejo, Ambarawa, serta sebagian Kecamatan Pagelaran dan Pardasuka, dengan debit air relatif kecil < 5 ltr/detik.
2. Cekungan Air Tanah Talang Padang berada di sebagian wilayah Kecamatan Pagelaran.

Jika ditinjau dari aspek tutupan lahan, yaitu cerminan pola aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Pringsewu didominasi oleh lahan kering yang ditanami dengan tanaman musiman atau tahunan (tegalan) yaitu sebesar 27,56%, diikuti oleh lahan sawah sebesar 19,51%, kebun 19,18% dan belukar sebesar 1,47%. Berdasarkan kondisi tutupan lahan tersebut, maka secara umum Kabupaten Pringsewu merupakan kawasan potensial bagi pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun 2010 mencapai 364,825 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,35% dengan persebaran terbesar 20,84% di Kecamatan Pringsewu dan terkecil 5,21% di Kecamatan Banyumas. Kepadatan penduduk mencapai 584 jiwa/km², tetapi terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kepadatan penduduk di Kecamatan Pringsewu sebagai wilayah paling padat dengan Kecamatan Pardasuka sebagai wilayah paling rendah. Kepadatan penduduk di

Kecamatan Pringsewu mencapai 1.427 jiwa/km², sementara di Kecamatan Pardasuka hanya mencapai 340 jiwa/km². Disparitas kepadatan penduduk antar wilayah kecamatan tersebut, menjadi dasar bagi system perhitungan prediksi jumlah penduduk berdasarkan wilayah, sehingga pada tahun 2011 jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu diperkirakan akan mencapai 534.157 jiwa.

Jika ditinjau dari aspek social budaya dalam konteks tata ruang, kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Pringsewu tercermin dari kualitas komunikasi dan interaksi antar penduduk asli dan pendatang yang berlangsung cukup kondusif. Meski penduduk daerah ini cukup heterogen karena penduduk pendatang berasal dari berbagai wilayah di kawasan nusantara, namun budaya asli masyarakat dapat dijumpai di beberapa daerah, terutama di desa Margakaya Kecamatan Pringsewu dan desa Pardasuka Kecamatan Pardasuka.

Jika ditinjau dari aspek potensi perikanan, Kabupaten Pringsewu tidak memiliki potensi perikanan laut, tetapi memiliki potensi perikanan air tawar yang cukup potensial. Potensi ini menjadi sektor primer usaha perikanan bagi sebagian masyarakat sekitar, yang mencakup kegiatan produksi budidaya (kolam, dan perairan umum). Sayangnya sektor sekunder yang berkaitan dengan pengolahan hasil perikanan pasca tangkap yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari produk perikanan dengan berbagai diversifikasinya belum banyak dilakukan. Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor tersier seperti aspek penanganan (*handling*), penyimpanan, transportasi, dan pemasaran produk perikanan ke tangan konsumen relatif belum trsentuh. Idealnya ketiga sektor tersebut saling

bersinergi dalam menumbuhkembangkan pembangunan sektor perikanan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu komoditas penting perikanan budidaya di Kabupaten Pringsewu adalah Ikan gurame, disamping komoditas lain seperti ikan lele, mas, nila, belut dan patin. Pada tahun 2011 pemanfaatan kolam untuk komoditas ikan Gurame adalah seluas 92,5 Ha dengan produksi sebesar 309,9 ton. Pemanfaatan kolam gurame tersebut menyebar di 4 (empat) kecamatan yakni, kecamatan Pagelaran, Pardasuka, Banyumas, dan Sukoharjo. (www.pringsewu.com), 09 Juni 2014

B. Profil Singkat Kecamatan Pagelaran

Kecamatan pagelaran merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu, yang terletak enam kilometer ke arah barat dari Pringsewu (ibukota Provinsi Lampung). Daerah ini merupakan sentra produksi ikan di kabupaten Pringsewu.

Luas wilayah kecamatan pagelaran mencapai 16.335 hektar yang terdiri dari 28 desa (pekon). Jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 58.012 jiwa masing-masing 29.637 jiwa laki-laki dan 28.375 jiwa perempuan. Kecamatan Pagelaran memiliki potensial untuk terus dikembangkan. Luas lahan potensial untuk perikanan mencapai 618 hektar. Sayangnya baru 322 hektar atau 52% dari total luas lahan tersebut yang telah dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar. Artinya masih terdapat 296 hektar atau 48% lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya.

Secara administratif, Kecamatan Pagelaran terdiri dari 28 wilayah pemerintahan desa. Sebanyak 68% atau 19 desa diantaranya merupakan sentra produksi perikanan dan memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, daerah ini juga mempunyai keanekaragaman kegiatan ekonomi, perdagangan, pendidikan, jasa pelayanan, kesehatan, dan sosial yang saling terkait. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi, terutama di daerah sentra produksi ikan relatif cukup memadai sebagaimana layaknya sebuah kota kecil yang masih memerlukan penataan.

Seluruh desa sentra produksi tersebut berada dalam suatu kawasan yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, dan terletak pada jarak maksimal tujuh kilometer dari pusat kecamatan. Ikan yang berasal dari sentra produksi ini sebagian besar mengalir ke Palembang dan Bandar Lampung yang merupakan pasar induk. Sebagian kecil didistribusikan untuk memenuhi pasar local, dan sebagian lainnya mengalir ke Pringsewu yang merupakan pasar local tingkat kabupaten.

Prasarana jalan dan sarana transportasi utama yang menghubungkan antarpasar di Kabupaten Pringsewu merupakan jalan negara yang kondisinya cukup baik. Hal ini dapat dimaklumi, karena daerah ini terletak pada jalur lintas barat Sumatera. Secara umum kondisi prasarana jalan dan sarana transportasi yang menghubungkan antara desa sentra produksi dan antar kabupaten bahkan antar provinsi dari dan ke daerah ini relative dalam kondisi baik.

Sebagian besar masyarakat khususnya sekitar daerah sentra produksi memperoleh pendapatan dari aktivitas perekonomian sektor perikanan dan aspek lain yang berkaitan dengan pasar dan pemasarannya. Meski demikian, aktivitas tersebut belum menyentuh pada industri pengolahan hasil budidaya ikan. Hubungan antar kota kecamatan dan kota kabupaten dengan daerah sentra produksi bersifat interdependensi (timbang balik) yang harmonis, serta saling membutuhkan. Masyarakat sekitar mengembangkan usaha budidaya (*on farm*) dan produk olahan skala rumah tangga (*off farm*) seperti rumah makan dan lain-lain. Sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan minabisnis seperti penyediaan sarana perikanan, pakaan, akses modal, teknologi, dan informasi pemasaran hasil produksi perikanan. Selain itu, terdapat indikasi bahwa kehidupan masyarakat sekitar sentra produksi hampir mirip dengan suasana kota, karena ketersediaan sarana dan prasarana pendukung relative tidak jauh berbeda dengan di kota. Berdasarkan karakteristik sebagaimana diuraikan di atas, maka kecamatan Pagelaran memenuhi persyaratan untuk dikembangkan sebagai kawasan minapolitan.

C. Gambaran Umum Tentang Program Minapolitan

Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Pedoman Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan minapolitan disusun sebagai upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan perencanaan kawasan minapolitan yang telah dituangkan

kedalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan minapolitan/ Masterplan Pengembangan Kawasan minapolitan. Dokumen RPIJM menjadi acuan dalam pemrograman dan penganggaran di Kawasan minapolitan. Mengingat strategisnya fungsi dari RPIJM, maka harus memiliki kualitas yang baik dan disiapkan secara sempurna dan terpadu dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kawasan minapolitan.

Seiring dengan berkembangnya jumlah kawasan minapolitan yang ada, perlu acuan yang akan menjadi dasar bagi daerah dalam penyusunan dokumen RPIJM kawasan minapolitan, sehingga ada standar dalam penyusunan dokumen RPIJM kawasan minapolitan dan selanjutnya akan memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen yang dibuat oleh daerah.

Dengan Pedoman Penyusunan RPIJM kawasan minapolitan ini, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun rencana penyediaan sarana, prasarana, kelembagaan dan SDM kawasan secara lebih detail sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Maksud dari penyusunan pedoman ini adalah sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah kawasan minapolitan tingkat kabupaten/kota

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah:

1. Terstandarnya dokumen RPIJM yang disusun oleh Kabupaten/Kota Pengembangan kawasan minapolitan; dan

2. Perangkat dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pengembangan Kawasan minapolitan yang melibatkan semua sektor dan stakeholder di setiap Kabupaten/Kota yang menjadi kawasan minapolitan